

**NASKAH PUBLIKASI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI  
KABUPATEN PATI**



**Oleh:**

**SEPTIAN CAHYA WARDHANI**

**B 200 090 211**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

## ABSTRAK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005). Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002:70). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Pati, untuk mengetahui strategi yang digunakan agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Pati berjalan efektif, untuk mengetahui problem yang dihadapi masyarakat dalam partisipasinya menyusun APBD di Kabupaten Pati.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode fenomena (fenomenologi). Sumber data berasal dari hasil angket yang telah diisi oleh LSM dan masyarakat Kabupaten Pati, serta hasil wawancara dari anggota DPRD Kabupaten Pati dan masyarakat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 1) wawancara, dan 2) angket/ kuisioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses penyusunan APBD di Kabupaten Pati ini melibatkan partisipasi masyarakat, strategi yang digunakan agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten pati dapat berjalan efektif ini dimulai dari desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan dibentuk Musrenbang, kemudian diadakan Musrenbang di tingkat Kabupaten. Hasil rumusan Musrenbang akhirnya setelah efektif dibawa ke anggota DPRD, dan jika tidak efektif akan dilakukan sidang paripurna sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak ada problem atau masalah yang dihadapi masyarakat dalam partisipasinya menyusun APBD di Kabupaten Pati, dalam penyusunan APBD anggota dewan bersikap transparan dan terbuka antara eksekutif dan legislatif, dan sidang paripurna pun disaksikan oleh banyak wartawan.

Kata Kunci: *Partisipasi, Masyarakat, APBD.*



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Telp. (0271)717417 Surakarta - 57102

---

**Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah**

Yang bertanda tangan dibawah ini pembimbing skripsi/tugas akhir :

Nama : Erma Setiawati, Dr., Akt., M.M.

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi/ tugas akhir dari mahasiswa :

Nama : Septian Cahya Wardhani

NIM : B 200 090 211

Program Studi : FEB Akuntansi

Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES  
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN PATI**

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 9 Juni 2015

Pembimbing

**Erma Setiawati, Dr., Akt., M.M.**

## **Pendahuluan**

Reformasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun daerah. Salah satu dampak dari reformasi tersebut adalah keluarnya Undang-Undang otonomi daerah No. 22 dan No. 25 tahun 1999 yang telah di amandemen menjadi Undang-Undang No. 32 dan No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Dampak lain dari reformasi tersebut adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan good governance sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Reformasi juga memunculkan kesadaran secara tiba-tiba yang berakibat timbulnya sikap-sikap keras dan radikal dari rakyat (Soeroso, 2000).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005). Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama DPRD menyusun Kebijakan Umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002:70). Partisipasi masyarakat menjadi penting bagi sebuah pemerintahan sebagai upaya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak yang terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan (Sisk, 2002). Jika partisipasi rakyat di daerah tinggi maka proses terciptanya otonomi dan desentralisasi akan terlaksana dengan lancar dan baik. Sebaliknya, bila aspirasi dan kepentingan masyarakat tidak dikedepankan, hal itu akan menimbulkan permasalahan baru di daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauhmana partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Pati berjalan efektif.
3. Untuk mengetahui problem yang dihadapi masyarakat dalam partisipasinya menyusun APBD di Kabupaten Pati.

## **Landasan Teori**

### **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi sebagai keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksudkan bukanlah bersifat pasif, tetapi secara aktif ditunjukkan oleh individu atau masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto, 1988). Sedangkan partisipasi

masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

### **Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama Legislatif Daerah menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran (PP Nomor 58 Tahun 2005).

#### **1. Input Output Penyusunan APBD**

Proses penyusunan ini, yang menarik dicermati adalah partisipasi masyarakat (public), bagian dari bottom up planning yang gampang dijual sebagai

gagasan namun agak sulit dilaksanakan. Sederet pertanyaan akan timbul, bagaimana mengangkat kepentingan masyarakat ke dalam pernyataan anggaran yang mempunyai aspek keajahteraan umum. Bagaimana pengalokasian yang adil antara belanja aparatur dan belanja publik. Apa yang dimaksud belanja publik dan bagaimana tolak ukurnya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran adalah azas atau prinsip universalitas anggaran, menurut Widjaja (2001:68) terdiri dari:

- a. Transparansi dan Akuntabilitas
- b. Disiplin Anggaran
- c. Keadilan Anggaran
- d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
- e. Format Anggaran

Adapun struktur APBD melingkupi tiga kelompok utama, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan di mana masing-masing dilengkapi dengan kode rekening.

## **2. Proses Penyusunan APBD**

Proses penyusunan anggaran Pemerintah Daerah biasanya selalu berpedoman kepada aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Tim Anggaran yang beranggotakan 3 bidang yang diketuai oleh Sekretaris Wilayah, yaitu:
  - 1) Pendapatan, diketuai oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah
  - 2) Pembangunan, diketuai oleh Ketua Bappeda

- 3) Rutin, diketuai oleh Kepala Biro Keuangan
- 2) Persiapan penyusunan anggaran meliputi permintaan usulan rencana anggaran pendapatan dan biaya unit kerja dalam bentuk DUK unyuk rutin dan DUP untuk pembangunan.
- 3) Berdasar informasi no. 2, disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Tim Anggaran.
- 4) Penyusunan anggaran pembangunan dilakukan koordinasi antar Bappeda Provinsi, Satuan Organisasi lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah, instansi-instansi sektoral, daerah-daerah Provinsi serta badan-badan lainnyan yang berada dalam wilayah provinsi.

### **3. Fungsi APBD**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Otorisasi
- b. Fungsi Perencanaan
- c. Fungsi Pengawasan
- d. Fungsi Alokasi
- e. Fungsi Distribusi
- f. Fungsi Stabilisasi

### **4. Tujuan Penyusunan APBD**

Tujuan penyusunan APBD adalah untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.



## **5. Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah**

Sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas beberapa sumber, yaitu sebagai berikut:

- a) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.
- b) Dana perimbangan merupakan alokasi dana yang disetujui secara bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c) Pinjaman daerah pendamping merupakan dana pinjaman dari pihak luar, selain modal dan pendapatan daerah
- d) Lain-lain penerimaan yang sah merupakan penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6. Pelaksanaan APBD**

Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan ramalan (prognosis) untuk enam bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan, terjadi jika:

- a. Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD

- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

## **7. Pertanggungjawaban APBD**

Gubernur/ Bupati/ Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

## **8. Pengeluaran Pemerintah Daerah**

Pengeluaran pemerintah daerah terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan. Belanja terdiri atas tiga macam pengeluaran, yaitu: belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pengeluaran rutin, yaitu pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam pos ini, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya. Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Adapun belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Bagi hasil pendapatan ke daerah yang menjadi otoritas dilakukan melalui tiga hal, di antaranya bagi hasil pajak ke kabupaten/ kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten/ kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/ kota. Adapun pengeluaran pembiayaan, di antaranya untuk pembayaran pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan pemberian pinjaman jangka panjang.

### **Peran Pemerintah Daerah, DPRD, dan Masyarakat dalam Menyusun APBD**

Peran Pemerintah Daerah pada saat penyusunan APBD adalah menyusun rancangan APBD yang kemudian diusulkan kepada Dewan untuk mendapat persetujuan. Sementara peran DPRD adalah menentukan apakah RAPBD yang telah disepakati dan telah dilaksanakan oleh Pemda sesuai dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diharapkan. Sedangkan peran masyarakat adalah memberikan penilaian terhadap tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja laporan APBD yang dibuat oleh Pemda. Dari laporan tersebut, masyarakat mendapatkan masukan untuk mengembangkan dan menyusun aspirasi lebih lanjut dan meningkatkan target APBD di masa mendatang. Peran Pemda, DPRD, dan masyarakat dalam tahap penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD, masing-masing memiliki keterkaitan hubungan.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode fenomena (fenomenologi). Satu ciri penting fenomenologi ialah

mengerjakan “perlakuan-perlakuan khusus terhadap data” di dalam keseluruhan prosedur penganalisisan data fenomenologis.

Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel penelitian yang akan diamati. Yang menjadi subjek penelitian adalah anggota DPR sebanyak 1 orang, LSM sebanyak 1 orang, serta penduduk atau masyarakat sebanyak 9 orang.

Setiap kegiatan penelitian selalu mengikuti suatu proses yang bertahap. Neuman (2000) menulis bahwa proses penelitian kualitatif dimulai dengan pemilihan topik. John Creswell (2008) menyajikan tahapan penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah
2. Pembahasan atau penelusuran kepustakaan (literature review)
3. Maksud dan tujuan penelitian
4. Pengumpulan data
5. Analisis dan penafsiran data
6. Pelaporan

Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Wawancara

Wawancara menurut (Nasir, 2009) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara tak berstruktur. Peneliti

mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada orang yang berkepentingan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan.

b. Angket/ kuisisioner

Menurut Kartono (1988: 200) kuisisioner atau angket adalah suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan umum (orang banyak), dilakukan dengan jalan mengedarkan suatu daftar pertanyaan berupa formulir-formulir, yang diajukan secara tertulis kepada sejumlah subjek untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan (respon) tertulis seperlunya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket tertutup karena pada angket yang digunakan oleh peneliti sudah disediakan pilihan jawabannya.

Untuk menggunakan cara yang telah ditentukan (pengamatan, wawancara, kuisisioner, dokumenter) dibutuhkan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data. Alat itulah yang kita sebut dengan instrumen penelitian. Supaya instrumen ini dapat berfungsi secara efektif, maka syarat validitas dan reliabilitas harus diperhatikan sungguh-sungguh. Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi dari responden.

Dalam setiap penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya, sehingga dalam setiap penelitian harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk bisa mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk mengembangkan validitas data penelitian. Cara-cara tersebut salah satunya berupa teknik triangulasi sumber data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu (Lexy J. Moleong, 2002:178).

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi dengan sumber data. Hal ini dikarenakan peneliti akan mengambil data dari wawancara dengan salah satu anggota DPR yang merupakan perwakilan dari rakyat untuk memperoleh informasi yang diperlukan oleh peneliti. Selain berwawancara, peneliti juga akan menggunakan angket yang disebarakan kepada LSM dan masyarakat untuk menambah hasil data yang diperlukan. Peneliti dapat menggunakan triangulasi dengan sumber karena dapat membandingkan antara data yang diperoleh dengan wawancara dan angket.

Yin (2003) mengajukan empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan Konstruk (Construct Validity)
2. Keabsahan Internal (Internal Validity)
3. Keabsahan Eksternal (External Validity)
4. Keajegan (Reabilitas)

Dalam penelitian ini, keajegan mengacu pada kemungkinan peneliti selanjutnya memperoleh hasil yang sama apabila penelitian dilakukan sekali lagi dengan subjek yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konsep keajegan penelitian kualitatif selain pada desain penelitian, juga pada cara pengumpulan data dan pengolahan data.

## **Analisi Data dan Pembahasan**

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah anggota dewan DPRD Kabupaten Pati, LSM, serta masyarakat. Anggota dewan DPRD Kabupaten Pati, LSM, dan masyarakat ini sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Obyek pada penelitian ini adalah realitas partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD.

Hasil dari angket yang telah peneliti sebarakan kepada masyarakat maupun LSM (LSM Laskar Penjawi), dari 10 angket, hanya ada 2 informan yang mengetahui mengenai penganggaran, dan 8 informan lainnya tidak mengetahui mengenai penganggaran. 2 informan ini bernama Bapak Warsito, S. Pd. dan Bapak Sarbin. Bapak Sarbin ini sekaligus sebagai anggota LSM Laskar Penjawi. Berikut ini adalah hasil dari 2 informan yang mengetahui tentang penganggaran:

### **1. Pengetahuan tentang Anggaran**

Dari hasil angket yang diperoleh peneliti dari kedua informan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari kedua jawaban informan tersebut. Persamaan tersebut antara lain terdapat dalam beberapa hal:

- a. Estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan dana yang tersembunyi.
- b. APBD disusun oleh DPRD dengan kepala daerah.
- c. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.
- d. Pertanggungjawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat I ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

- e. Pertanggung jawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat II ditujukan kepada Gubernur.
- f. Dalam penyusunan APBD, Pemda dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara.
- g. Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran.
- h. Jumlah anggaran yang disetujui dewan legislatif harus dimanfaatkan oleh eksekutif secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- i. Anda sebagai anggota dewan perlu untuk memiliki pengetahuan tentang penyusunan APBD.
- j. Anda sebagai anggota dewan perlu untuk memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan APBD.
- k. Anda sebagai anggota dewan perlu memiliki pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD.
- l. Anda sebagai anggota dewan perlu memiliki pengetahuan untuk mendeteksi terjadinya pemborosan dan kejanggaran dalam pelaksanaan APBD.

Selain dari persamaan di atas, ada pula beberapa perbedaan dalam beberapa hal, antara lain:

- a. Anggaran publik mendapatkan otorisasi legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- b. Prinsip anggaran yang bersifat komprehensif tidak memasukkan dana non-budgetair.



- c. Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD.
- d. DPRD membahas kebijakan umum APBD dalam pembahasan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Dalam hal partisipasi masyarakat, kedua informan memberikan jawaban yang semuanya sama. Semua persamaan tersebut terdapat dalam beberapa hal, antara lain:

- a. Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat.
- b. Prioritas dan rencana APBD selalu mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat.
- c. Dalam penyusunan APBD selalu melibatkan masyarakat.
- d. Dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD, selalu melibatkan masyarakat.
- e. Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD.
- f. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.

### **2. Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)**

Selain itu, mengenai pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) juga terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua informan. Persamaan tersebut antara lain terdapat dalam beberapa hal:

- a. Anggota Dewan selalu dilibatkan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.
- b. Anggota Dewan selalu melakukan analisis politik terhadap proses penyusunan APBD.
- c. Anggota Dewan selalu dilibatkan dalam pengesahan APBD.
- d. Anggota Dewan harus meyakinkan bahwa APBD telah memiliki transparansi.
- e. Anggota Dewan harus selalu memantau pelaksanaan APBD.
- f. Anggota Dewan selalu mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban yang disusun Pemerintah Daerah.
- g. Evaluasi yang dilakukan Dewan mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD.
- h. Anggota Dewan selalu meminta keterangan berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati atau Walikota.
- i. Anggota Dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti jika terjadi kejanggaran dalam LPJ APBD.
- j. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

- k. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan hasil program.

Selain dari persamaan di atas, ada 1 hal perbedaan dari kedua informan, yaitu:

- a. Anggota Dewan memiliki kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun pihak Pemerintah Daerah.

Selain hasil dari angket tersebut, peneliti juga telah melakukan wawancara kepada anggota dewan DPRD yang bernama Bapak H. Darbi yang menjabat pada periode tahun 2014 – 2019 dan kepada masyarakat yang diwakili oleh Bapak Warsito, S. Pd.

Dari hasil wawancara dengan anggota DPR yang bernama Bapak H. Darbi dan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat yang diwakili oleh Bapak Warsito, S. Pd. dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini dalam proses penyusunan APBD melibatkan partisipasi masyarakat sehingga ide, saran, maupun kritik dari masyarakat dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah karena nantinya dana APBD tersebut juga akan digunakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat serta membangun fasilitas umum yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat pula. Selain itu, saran maupun kritik dari masyarakat ini dapat digunakan sebagai acuan untuk merevisi APBD untuk tahun selanjutnya. Di sini peran masyarakat juga sebagai pemberi penilaian terhadap tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja laporan APBD yang dibuat oleh Pemda.

Meskipun melibatkan masyarakat, tetapi dalam proses penyusunan APBD ini tidak mengalami kendala atau masalah. Hal ini dikarenakan anggota dewan DPRD bersikap transparan dan terbuka antara eksekutif dan legislatif dan saat sidang paripurna juga dilakukan secara terbuka sehingga dapat disaksikan oleh wartawan.

Keefektifan dalam proses penyusunan APBD yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat berjalan dikarenakan dalam menyusun APBD dimulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten yang membentuk Musrenbang. Setelah itu dibawa ke anggota dewan DPRD sehingga dapat diketahui rumusan Musrenbang ini sudah efektif atau belum. Jika belum efektif akan diparipurnakan, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## **Penutup**

### **Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD di Kabupaten Pati, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada proses penyusunan APBD di Kabupaten Pati ini melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini diungkapkan bahwa proses penyusunan APBD ini dimulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Musrenbang dari kecamatan, kemudian dilanjutkan Musrenbang dari kabupaten. Hasil rumusan Musrenbang tersebut dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang ada di masyarakat, diusulkan kepada Pemda, kemudian baru dibuat dan dimasukkan ke dalam APBD.

2. Strategi yang digunakan agar partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD di Kabupaten Pati dapat berjalan efektif ini dimulai dari desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan dibentuk Musrenbang, kemudian diadakan Musrenbang di tingkat Kabupaten. Hasil rumusan Musrenbang akhirnya setelah efektif dibawa ke anggota DPRD, dan jika tidak efektif akan dilakukan sidang paripurna sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Tidak ada problem atau masalah yang dihadapi masyarakat dalam partisipasinya menyusun APBD di Kabupaten Pati. Dalam penyusunan APBD anggota dewan bersikap transparan dan terbuka antara eksekutif dan legislatif, dan sidang paripurna pun disaksikan oleh banyak wartawan.

## **Saran**

1. Bagi Masyarakat
  - a. Masyarakat agar lebih memahami dan mengetahui mengenai penganggaran sehingga ketika akan dilakukan proses penyusunan APBD, masyarakat dapat turut serta memberikan ide, saran, maupun kritik sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan APBD.
  - b. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD bukan hanya untuk kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, diharapkan agar semua lapisan masyarakat mengetahui serta memahami mengenai penganggaran ini agar dapat menyalurkan aspirasinya.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Anggota Dewan DPRD

- a. Pemerintah Daerah agar selalu menerima apa yang disampaikan oleh masyarakat baik berupa saran maupun kritik sehingga bisa menjadi acuan dalam merevisi dalam penyusunan APBD tahun berikutnya.
- b. Anggota dewan DPRD maupun Pemda agar mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum mengetahui mengenai penganggaran agar masyarakat dari seluruh lapisan dapat berpartisipasi menyampaikan ide, saran maupun kritik dalam penyusunan APBD.
- c. Dana APBD yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat agar bisa diberikan secara lebih adil dan merata meskipun di Kabupaten Pati masih banyak warga yang miskin.

## Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Daymon, Christine., dan Immy Holloway. 2008. *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communication*. Yogyakarta: Bentang.
- Gulo, W. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- uliandi., Azuar., Irfan., dan Saprinal Manurung. 2014. *Metode Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- K., Septiawan Santana. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lexy, J. Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawar. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Padang 23-26 Agustus 2006.
- Sopannah. \_\_\_\_\_. *Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD*. Universitas Widyagama Malang.
- Urusi, Nirwanto. 2010. *Studi Proses Penyusunan Anggaran Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah*.
- Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT. Setia Purna Inves.
- Werimon, Simson., Imam Ghozali, dan Mohamad Nazir. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar 26-28 Juli 2007